

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KASUS
HUKUM DALAM MAJALAH TEMPO
EDISI JULI 2012**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Peryaratan Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan (M. Pd.) pada Program Studi Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2) di Universitas Bengkulu

OLEH

NOPITA DESIANA

NIM A2A011025

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S-2)
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

2013

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KASUS
HUKUM DALAM MAJALAH TEMPO
EDISI JULI 2012**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Peryaratan Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan
(M. Pd.) pada Program Studi Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2) di
Universitas Bengkulu

OLEH

NOPITA DESIANA

NIM A2A011025




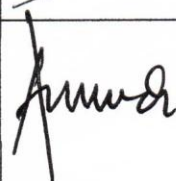

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S-2)
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

2013

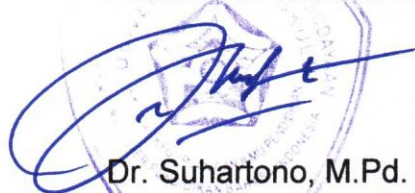
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis Oleh Nopita Desiana NPM A2A011025 telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 28 Juni 2013

Dewan Penguji

No.	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Penguji I Prof. Drs. Safnil, M.A., Ph.D. NIP 19610121 198601 1 002		28 Juni 2013
2.	Penguji II Dr. Dian Eka Chandra W., M.Pd NIP 19591104 198403 2 001		28 Juni 2013
3.	Penguji III Dr. Susetyo, M.Pd. NIP 19551107 198303 1 002		28 Juni 2013
4.	Penguji IV Dr. Azwandi, M.A NIP 19580722 198803 1 004		28 Juni 2013
5.	Penguji V Dr. Suhartono, M.Pd. NIP 19620429 198603 1 003		28 Juni 2013

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2)
Pendidikan Bahasa Indonesia,



Dr. Suhartono, M.Pd.
NIP 19620429 198603 1 003

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I,



Prof. Drs. Safnil, M.A., Ph.D.
NIP 19610121 198601 1 002

Tanggal: 28 Juni 2013

Pembimbing II,



Dr. Dian Eka Chandra W., M.Pd.
NIP 19591104 198403 2 001

Tanggal: 28 Juni 2013

PERSETUJUAN PANITIA UJIAN PASCASARJANA (S-2)

Ketua Program,

Dr. Suhartono, M.Pd.
NIP 19620429 198603 1 003

Tanggal: 28 Juni 2013



Sekretaris Program,

Dr. Dian Eka Chandra W., M.Pd.
NIP 19591104 198403 2 001

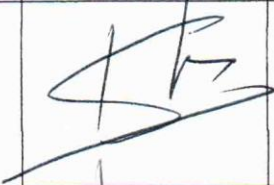
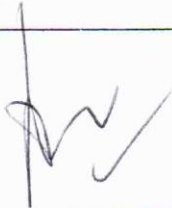

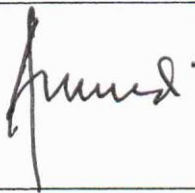
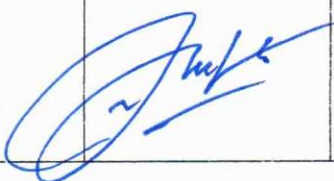
Tanggal: 28 Juni 2013



Nama : Nopita Desiana
NPM : A2A011025
Tanggal Lulus : 28 Juni 2013

BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS

Nama : Nopita Desiana
NPM : A2A011025

No.	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Penguji I Prof. Drs. Safnil, M.A., Ph.D. NIP 19610121 198601 1 002		Juni 2013
2.	Penguji II Dr. Dian Eka Chandra W., M.Pd NIP 19591104 198403 2 001		Juni 2013
3.	Penguji III Dr. Susetyo, M.Pd. NIP 19551107 198303 1 002		Juni 2013
4.	Penguji IV Dr. Azwandi, M.A NIP 19580722 198803 1 004		Juni 2013
5.	Penguji V Dr. Suhartono, M.Pd. NIP 19620429 198603 1 003		Juni 2013



UNIVERSITAS BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopita Desiana

NPM : A2A011025

Fakultas/Program : FKIP/Pascasarjana (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Juni 2013
Yang membuat pernyataan



Nopita Desiana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- **Ketika kamu “melangkah” jangan pernah berpikir untuk “mundur” dan berhenti. Apalagi yang kamu kerjakan adalah untuk kebaikan, karena penyesalan yang nantinya akan kamu terima.**
- **Jangan pernah menyesali atas semua yang pernah kamu lakukan, karena itu semua merupakan proses untuk mengenali jati diri.**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta; **Papa: Achmad Bustomi** dan **Mama: Helina**, yang senantiasa berdoa, memberikan cinta, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya, serta menuntun dan membantuku walaupun terkadang harus tertatih-tatih,
- Kedua orang adikku yang tercinta: Almarhum Bachriansyah (Bobi) dan Mariyati (Mey). Teruslah tersenyum dek walaupun dunia ini tak seindah impian.
- Keponakanku yang imut dan pintar: Keyla Putri Rahmadini Agustia (Key), celotehan dan senyuman polosmu merupakan penyemangat bagiku, cepatlah besar ‘Nak.
- Dosen pembimbingku, terimakasih atas semua hal yang positif yang diberikan.
- Teman-teman seperjuangku, Akhirudin, S.Pd., Tarmizi, S.Pd., dan Toto Suprpto, S.Pd., “terimakasih teman atas semua bantuan dan motivasi kalian”.
- Almamaterku tercinta, **Universitas Bengkulu.**

Nopita Desiana, 2013. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Hukum Dalam Majalah *Tempo* Edisi Juli 2012. Tesis Program Pascasarjana (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu. Dibimbing oleh (1) Prof. Drs. Safnil, M.A., Ph.D., dan (2) Dr. Dian Eka Candra Wardhana, M.Pd.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bentuk ideologi hukum yang dianut wartawan majalah *Tempo*, dan (2) untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur kekuasaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis dengan metode analisis wacana kritis (AWK). Sumber penelitian ini adalah empat buah teks wacana berita tentang hukum dalam majalah *Tempo* edisi Juli 2012. Sedangkan data penelitian ini berupa kosakata, frase, atau kalimat yang dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: mentranskripsikan data dari dokumen (teks berita), mengelompokan/mengklasifikan kata, frase, atau kalimat, serta gambar latar kondisi kasus yang diangkat dalam pemberitaan yang mengandung ideologi hukum, menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberitaan kasus hukum mengandung ideologi hukum yang lebih berpihak kepada rakyat dan keadilan, serta tidak mengandung karakteristik kekuasaan dalam pemberitaannya. Ketajaman, kekritisannya wartawan dalam menyoroiti permasalahan dalam pemberitaannya hanya sebagai bentuk identitas diri dari majalah *Tempo* yang tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah. Ideologi hukum itu tampak pada cara pemilihan kosakata, frase, kalimat, dan pengutipan-pengutipan yang memunculkan partisipan dalam pemberitaan, serta gambar latar kondisi kasus yang dimunculkan dalam pemberitaan.

Kata Kunci : Analisis Wacana Kritis (AWK), Berita Hukum, Majalah *Tempo*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Hukum Dalam Majalah *Tempo* Edisi Juli 2012 untuk pemenuhan sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Mukhtar, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu.
3. Dr. Suhartono, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu.
4. Prof. Drs. Safnil, M.A., Ph.D., dan Ibu Dr. Dian Eka Candra W., M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak memberi pengarahan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berguna bagi penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis dari mulai menjadi mahasiswa Program Studi Pascasarjana ini sampai dengan menyelesaikan studi tersebut.

6. Buat rekan-rekan seperjuanganku, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini. Kalian adalah sahabat, rekan, dan saudara yang telah memberi warna dalam kehidupanku.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini.

Demikianlah tesis ini disusun, semoga apa yang penulis sajikan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Bengkulu, 29 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
 HALAMAN PERSETUJUAN	
A. Persetujuan dan Pengesahan Tesis.....	iii
B. Persetujuan Komisi Pembimbing.....	iv
C. Bukti Pengesahan Perbaikan Tesis.....	v
 MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Istilah	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Idiologi Dalam Wacana.....	9
B. Kekuasaan dalam Wacana.....	24
C. Definisi Analisis Wacana Kritis (AWK).....	27
D. Berita Hukum/Kriminal.....	32
E. Penelitian yang Relevan	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Data dan Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	38
E. Pengecekan Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel. Bukti-bukti Linguistik Wacana Berita Kasus Hukum Pada Majalah *Tempo*
Edisi Juli 2012

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Wacana Berita Kasus Hukum Pada Majalah *Tempo* Edisi Juli 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu norma yang bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat yang menjelma dalam berbagai bentuk diantaranya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara hukum dapat tercermin salah satunya melalui kekuasaan kehakiman yang ditandai sebagai kekuasaan negara yang merdeka. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum dan keadilan sebagai produksi peradilan mesti merefleksikan nilai-nilai luhur ideologi negara dalam Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam perspektif ini, maka sebuah produk pengadilan baik putusan maupun penetapan harus mengandaikan sifat-sifat ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keberadaban, persatuan dan kesatuan NKRI, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial untuk semua. Hal itu yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha, pejabat, dan pemerintah, sebagai warga negara yang baik harus patuh dan disiplin dalam menjalankan hukum. Tetapi kecenderungan yang berbeda justru terjadi di dalam masyarakat, bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum banyak terjadi terutama di kalangan pengusaha, pejabat atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh kekuasaan dalam melanggengkan kepentingannya secara individu atau kelompok. Realitas inilah yang coba

dikonstruksikan oleh penulis teks (wartawan) dari media massa melalui pemberitaannya. Seperti pemberitaan tentang kasus-kasus hukum dalam majalah *Tempo* edisi Juli 2012.

Majalah *Tempo* adalah majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya meliput berita dan politik. Edisi pertama *Tempo* diterbitkan pada Maret 1971 yang merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Selama terbit sampai sekarang *Tempo* sudah beberapa kali pernah menuliskan laporan yang bersifat investigasi, antara lain pada tahun 1994 meliput tentang kerusuhan Tanjungpriok, pembelian kapal bekas RI dari Jerman, dan sebagainya. Peliputan investigatif tampaknya mulai dipakai wartawan secara serius sejak dekade 1990-an. Sejak reformasi bergulir tahun 1998, pelaporan investigatif banyak mendapat tempat dengan memberitakan kasus-kasus korupsi.

Wacana yang dikonstruksikan oleh wartawan majalah *Tempo* tidak sepenuhnya netral atau alami melaporkan berita tentang korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran hukum, akan tetapi telah dipengaruhi oleh ide-ide atau sudut pandang penulis teks (wartawan) dalam menyingkapi peristiwa yang dikonstruksikan di dalam pemberitaannya. Sehingga terjadi pro dan kontra pemahaman khalayak terhadap pemberitaan tersebut.

Pada dasarnya sebuah wacana berita media massa merupakan konstruksi dari realitas-realitas suatu peristiwa sampai membentuk sebuah wacana yang bermakna. Hamad (2004: 10) mengungkapkan bahwa seluruh isi media merupakan realitas yang dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk

wacana yang bermakna. Oleh karena itu, adanya ideologi penulis teks (wartawan) dalam pemberitaannya juga mempengaruhi konstruksi yang akan terbentuk pada media tersebut.

Konstruksi pemberitaan dari suatu media erat kaitannya dengan ideologi media dan penulis media (wartawan) tersebut. Sehingga pemberitaan-pemberitaan yang disajikan oleh wartawan pun sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, dan sudut pandangnya dalam merefleksikan suatu peristiwa ke dalam sebuah wacana yang bermakna. Selain itu ideologi yang diusung oleh media massa tersebut sangat berpengaruh terhadap penerbitan-penerbitan beritanya.

Bentuk-bentuk dari ideologi penulis teks (wartawan) yang terdapat di dalam teks berita media massa berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan, dan keberpihakan terhadap salah satu partisipan dalam pemberitaannya. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu (1) bagaimana bentuk ideologi hukum yang dianut oleh majalah *Tempo*, (2) ada atau tidak adanya unsur kekuasaan dalam wacana berita pada majalah *Tempo*. Kedua permasalahan ini yang menarik untuk dikaji karena majalah *Tempo* sebagai salah satu media nasional yang pertama menerapkan sistem investigatif dalam pengkonstruksian beritanya.

Idiologi dalam suatu pemberitaan terkadang bisa muncul tanpa disadari oleh penulis teks. Hal itu disebabkan karena pemahaman khalayak tentang berita itu yang beragam. Idiologi merupakan cara berpikir seseorang atau suatu golongan; kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang

memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Ananda Santoso, A.R. Al Hanif dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Konsep ideologi ini dijelaskan lebih lanjut oleh Raymond William (1997, Fiske, 2012: 269) tentang tiga penggunaan utama dari ideologi, yaitu: (1) sebuah sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas atau kelompok tertentu, (2) sebuah sistem kepercayaan palsu-ide atau kesadaran palsu-yang dapat dikontraskan dengan kebenaran atau pengetahuan ilmiah, dan (3) proses umum produksi makna dan ide. Untuk mengkaji ideologi yang terdapat di dalam majalah *Tempo* edisi Juli 2012, maka digunakan analisis wacana kritis (AWK) sebagai metodenya.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi secara lengkap yang diusung dalam sebuah wacana tidak bersifat natural atau alami. Karena komunikasi yang tercipta dalam sebuah media massa telah mengandung maksud-maksud tersembunyi dari penulisnya. Dengan kata lain ada ideologi-ideologi tersembunyi yang diciptakan oleh penulisnya yang dilatarbelakangi oleh kekuasaan yang dominan dari media massa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu (1) bagaimana bentuk ideologi hukum yang dianut oleh majalah *Tempo*, dan (2) ada atau tidak adanya karakteristik yang mengandung kekuasaan dalam wacana berita kasus hukum majalah *Tempo* edisi Juli 2012?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk ideologi hukum wartawan majalah *Tempo*, dan untuk mengetahui ada atau tidak adanya kekuasaan dalam pemberitaannya.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Ada dua manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan tentang analisis wacana kritis (AWK).
- b. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat dan mahasiswa dalam memahami karakteristik suatu media.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk media, diharapkan agar lebih objektif, berimbang dan netral dalam penyusunan berita.
- b. Untuk masyarakat, agar mengetahui bagaimana sebuah berita diproduksi sehingga diharapkan dapat lebih kritis dan selektif dalam memahami berita yang disajikan oleh sebuah media tidak selalu bersifat netral.

F. Definisi Istilah

1. Analisis Wacana Kritis(AWK)

Menurut Fairclough Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan pendekatan yang berusaha melakukan penyelidikan secara sistematis terhadap

hubungan-hubungan kausalitas dan penentuan yang sering sama antara (a) praktik kewacanaan, peristiwa dan teks, (b) struktur-struktur kultural dan sosial yang lebih luas, hubungan dan proses, (c) bagaimana praktik, peristiwa dan teks muncul di luar dan secara ideologis dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan perjuangan atas kekuasaan, (d) bagaimana kesamaran hubungan-hubungan antara wacana dan masyarakat itu sendiri merupakan faktor yang melanggengkan kekuasaan dan hegemoni (Jorgensen dan Phillips, 2009:120). AWK juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan sosial yang tercermin dalam teks atau ucapan. AWK berkaitan dengan studi dan analisis teks serta ucapan untuk menunjukkan sumber diskursif, yaitu kekuatan, kekuasaan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan prasangka. Seperti yang diungkapkan oleh Habermas (1973, dalam Yoce Aliah Darma, 2009: 53) bahwa AWK bertujuan membantu menganalisis dan memahami masalah sosial dalam hubungannya antara ideologi dan kekuasaan. Tujuan AWK adalah untuk mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung dibalik kata-kata dalam teks atau ucapan dalam berbagai bentuk kekuasaan.

2. Ideologi

Ideologi merupakan suatu kumpulan dari ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi, sebagai cara memandang dunia (*weltanschauung*). Ideologi pun merupakan sebuah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada berbagai persoalan sehingga membuat konsep abstrak ini menjadi inti dalam dunia sosial, termasuk didalamnya adalah permasalahan hukum. Ide atau gagasan atau visi hasil dari pemikiran individu atau kelompok tersebut dapat diwujudkan dalam

bentuk peraturan perundang-undangan, tata tertib, hukum(hukum adat dan hukum negara), yang mengatur hubungan antar individu didalam masyarakat dan negara. Pesan-pesan hukum dari idiologi itu dapat disalurkan dan disampaikan kepada khalayak melalui saluran media massa. Karena pada dasarnya suatu media merepresentasikan suatu idiologi dari penulisnya melalui wacana yang diusungnya. Bentuk ideologi dari penulis di media massa cetak dapat berupa nilai-nilai, pandangan dan sikap independesi penulis itu sendiri.

3. Berita Hukum

Berita dalam istilah Inggris adalah “News” atau baru, dengan konotasi pada hal-hal baru. Secara etimologis istilah “berita” dalam bahasa Indonesia mendekati istilah “*bericht (en)*” dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda istilah “*bericht (en)*” dijelaskan sebagai “*mededeling*” (pengumuman) yang berakar kata dari “*made (delen)*” dengan sinonim pada “*bekend maken*” (memberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal) dan “*vertelen*” (menceritakan atau memberitahukan) (van Haeringen, 1977:87 dan 559; Wojowasito, 1981: 70, 394, dan 740). Sedangkan Departemen Pendidikan RI (1989: 108 dan 331) membakukan istilah “berita” dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Juga “berita” disamakan maknaya dengan “khabar” dan “informasi (resmi)”, yang berarti penerangan, keterangan, atau pemberitahuan. Salah satu jenis berita yang ada didalam majalah *Tempo* adalah berita tentang pelanggaran hukum.

4. Majalah Tempo

Tempo merupakan salah satu jenis media massa nasional yang memiliki jaringan pembaca di dalam dan luar negeri. Dengan mengusung informasi yang akurat, terpercaya, dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Sebagai salah satu media massa nasional, *Tempo* memiliki beberapa saluran informasi, yaitu surat kabar *Tempo*, koran digital *Tempo*, televisi, dan majalah *Tempo*. Untuk objek penelitian ini difokuskan pada majalah *Tempo* yang terbit berkala atau majalah berita mingguan yang umumnya meliput berita dan politik. Wacana berita yang diambil adalah wacana berita hukum pada majalah *Tempo* edisi Juli 2012.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Idiologi Dalam Wacana

1. Defenisi Idiologi

Kata idiologi adalah “*ideologie*” dalam bahasa Perancis yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu, *ideo* yang mengacu pada gagasan dan *logie* yang mengacu pada logos, atau dalam bahasa Yunani adalah logika dan rasio. Secara etimologis kata idiologi didefinisikan sebagai ‘ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan’. <http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi>.

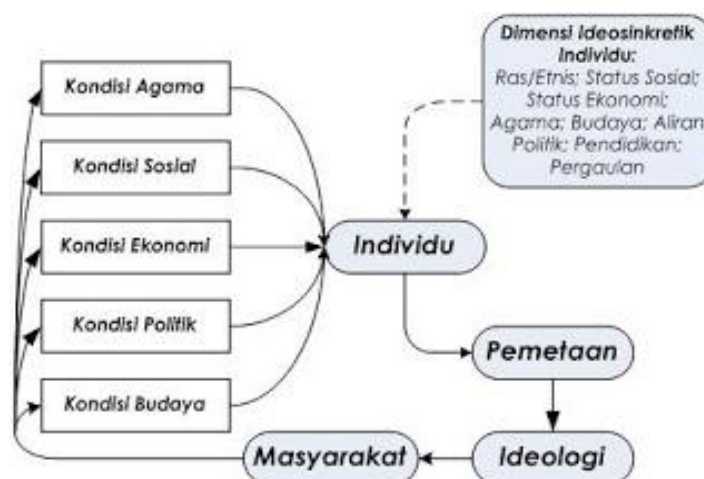
Idiologi merupakan cara berpikir seseorang atau suatu golongan; kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Ananda Santoso, A.R. Al Hanif dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Raymond William (1997, Fiske, 2012: 269) menjelaskan lebih lanjut tentang tiga batasan utama dari ideologi, yaitu: (1) sebuah sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas atau kelompok tertentu, (2) sebuah sistem kepercayaan palsu-ide atau kesadaran palsu-yang dapat dikontraskan dengan kebenaran atau pengetahuan ilmiah, dan (3) proses umum produksi makna dan ide.

Ideologi yang pertama penggunaannya lebih mengacu pada psikologis atau bagaimana sikap di organisasi ke dalam pola yang koheren. Seperti yang diungkapkan oleh Brockreide (1968) bahwa ‘rumah dari sikap adalah ideologi.

Untuk batasan penggunaan ideologi yang kedua lebih mengarah pada kategori ilusi dan kesadaran palsu, tempat di mana kelas penguasa memelihara dominasinya terhadap kelas pekerja. Sedangkan penggunaan ideologi yang ketiga digunakan untuk mendeskripsikan produksi sosial dari makna. Artinya ideologi yang ketiga ini dipandang bukan hanya seperangkat nilai yang statis dan juga bukan cara pandang, melainkan sebuah praktik.

Sementara itu ideologi adalah sebuah jalan untuk melakukan pemaknaan (membuat sesuatu masuk akal), makna yang dibuat selalu memiliki dimensi sosial dan politik. Ideologi di dalam cara pandang ini merupakan sebuah praktik/tindakan sosial.

Ideologi dapat diartikan juga sebagai pemetaan realitas sosial oleh individu yang digunakan untuk menggerakkan kelompok atau masyarakat guna mengubah kondisi nyata seperti apa yang dinyatakan di dalam muatan ideologi. Seperti digambarkan peta pengertian ideologi berikut ini.



Terdapat kondisi nyata seputar agama, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kondisi-kondisi tersebut (seluruhnya atau beberapa) diserap oleh

individu. Individu yang memperhatikan ini memiliki dimensi ideosinkretik (latar belakang) ras/etnik, status sosial, status ekonomi, agama, budaya, aliran politik, pendidikan, dan pergaulan tertentu. Dimensi ideosinkretik ini mempengaruhi pemetaan yang ia lakukan terhadap kondisi-kondisi nyata tersebut. Pemetaan hasil pemikiran individu tersebut melahirkan apa yang disebut ideologi. Lalu, ideologi ini disebarkan si individu, terutama kepada kelompok dan masyarakat yang mendukung atau berpotensi untuk digerakkan oleh ideologi tersebut. Ideologi ini digunakan untuk mengubah kondisi nyata sesuai tujuan dari ideologi yang bersangkutan.

Ideologi muncul karena adanya kekuasaan. Kekuasaan sosial didasarkan pada hak akses terhadap sumber-sumber yang bernilai sosial, seperti kekayaan, penghasilan, posisi/jabatan, dan status sosial, termasuk akses terhadap berbagai diskursif(wacana), yang merupakan sumber kekuasaan yang penting. Kekuasaan juga berdimensi kognitif artinya selain mengontrol aksi, juga membatasi kebebasan bertindak dari kelompok yang terdominasi, tetapi juga mempengaruhi jalan pikirannya.

Hal yang terpenting bahwa kekuasaan yang lebih modern dan cenderung efektif, kebanyakan bersifat kognitif, yang dicapai di antaranya melalui persuasi dan manipulasi. Termasuk memanipulasi kebenaran yang ada didalam sebuah wacana. Untuk itu diperlukan “akal sehat” untuk memahami kebenaran sebuah wacana. Seperti yang diungkapkan oleh Raymond William (1997, Fiske, 2012: 269) tentang batasan utama ideologi pada point dua, yaitu tentang “kesadaran palsu”. Mark (Fiske, 2012: 280-281) mengungkapkan tentang konsep ideologi

yang relatif sederhana, yaitu ideologi merupakan alat bagi kelas penguasa untuk membuat ide-ide(pemikiran) mereka diterima di dalam masyarakat sebagai sesuatu yang alami dan normal. Ideologi Mark ini terkait pada bidang ekonomi. Menurut Mark ideologi dari kaum borjuis membuat para pekerja, atau kaum proletar berada pada kondisi kesadaran palsu (*false consciousness*). Kesadaran manusia mengenai siapa mereka, bagaimana mereka berhubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dan juga termasuk makna yang mereka ciptakan terkait dengan pengalaman sosial mereka diproduksi oleh masyarakat, bukan oleh alam ataupun biologi. Kesadaran kita ditentukan oleh masyarakat di mana dilahirkan, tidak oleh kondisi alamiah kita atau psikologi individual.

Jadi salah satu bentuk adanya kekuasaan dari penulis di era modern yang cenderung efektif bersifat kognitif, yang dicapainya melalui persuasi dan manipulasi. Independensi merupakan salah satu bentuk ideologi penulis untuk mempersuasi khalayak terhadap ide/gagasan ingin disampaikan penulis.

Di majalah *Tempo* edisi 16-22 Juli terdapat berita tentang “Jejak Hitam Gubernur Hijau” yang intinya tentang pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada kerusakan hutan, yang disebabkan oleh keputusan yang diambil oleh salah satu pejabat teras di Aceh. Di dalam berita tersebut penulis secara “gamblang” menjelaskan tentang pelanggaran yang berujung pada kerusakan di Rawa Tripa, Aceh. Bahkan dalam peristiwa pelanggaran tersebut turut campur penegak hukum atau pihak yang melanggar dilindungi oleh aparat penegak hukum yang seyogyanya sebagai penegak keadilan dan kebenaran. Seperti kutipan berikut.

- (1) “Para aktivis lingkungan juga menuding polisi dan Tentara Nasional Indonesia berada di belakang Kallista. menurut Halim Gurning,

Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari di Nagan Raya, kantor dan lahan Kallista selama ini dijaga polisi dan tentara. Mereka melarang warga dan para aktivis memasuki lahan PT Kallista. “Komandan mereka mengancam kami dan anak buahnya mengintai kantor kami,” kata Halim.

Dalam kutipan tersebut tergambar bagaimana sosok polisi dan tentara dalam memosisikan diri sebagai agen dari hukum yang didesain untuk melindungi kepentingan mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dengan kata lain menjaga mereka yang berkuasa dari perlawanan kekuatan perubahan sosial. Hal itu akan lebih memperkuat mitos bahwa polisi atau tentara adalah “sosok yang arogan dan kuat akan hukum” seperti halnya pejabat.

Jadi tindakan yang mereka (polisi, tentara, pejabat) lakukan adalah wajar dan “alami”. Kesadaran itu yang coba dibangun oleh penulis terhadap pembacanya dalam menginterpretasi peristiwa yang ada bahwa mereka (Polisi, Tentara, Pejabat) adalah sosok individu manusia yang dapat melanggar hukum terlepas dari jabatan/statusnya sebagai apa dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Hal inilah yang disebut sebagai kesadaran palsu karena menyangkal makna yang ‘benar’ oleh sifat dasar polisi, tentara, dan pejabat’.

Selain itu ada hal yang esensial dari berita tersebut jika diinterpretasikan secara benar bahwa penulis bukan hanya memaparkan tentang kerusakan yang dialami hutan gambut Rawa Tripa, tetapi lebih mengandung makna secara implisit bahwa kinerja pemerintah yang lamban dalam menangani kerusakan hutan gambut Rawa Tripa, Aceh atau lebih tepatnya diusut menjelang binasa.

Dari rangkaian kalimat di dalam kutipan di atas, terlihat penulis berusaha mempersuasi pembaca melalui sudut pandangnya dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Selain batasan tentang ideologi di atas, Antonio Gramsci, memperkenalkan ideologi *hegemony*. Secara singkat, *hegemony* melibatkan dan menenangkan kembali persetujuan dari mayoritas terhadap sistem yang menundukkan mereka. Dua elemen dari Gramsci yang lebih ditekankan oleh Mark atau Althusser adalah resistensi dan ketidakstabilan. Salah satu strategi kunci dari hegemoni adalah konstruksi 'akal sehat'. Jika pemikiran-pemikiran dari kelas penguasa dapat diterima sebagai hal yang masuk akal (tidak ada tendensi kelas), kemudian objek ideologis dari mereka tercapai dan kerja ideologis mereka tertutupi. Contoh dari 'akal sehat' adalah di dalam masyarakat kita kriminal adalah individu-individu yang aneh dan menyimpang yang perlu hukuman atau koreksi. Cara berpikir seperti itu menutupi kenyataan bahwa para pelanggar hukum adalah orang-orang yang ke luar dari proporsi masyarakat karena berasal dari kelompok sosial yang lemah atau terpinggirkan-mereka berasal dari ras, kelas, atau umur yang 'salah (tindak dominan)'.

Jadi, cara berpikir yang masuk akal membuat mereka dan tidak membuat mereka bisa berpartisipasi pada logika masuk akal sehingga penyebab kriminalitas lebih bersifat sosial dibandingkan karena faktor individual. Sedangkan warga Negara yang 'patuh hukum', yang secara 'umum' dan 'kebetulan' berasal dari kelas-kelas yang memiliki banyak kesempatan untuk mengakses alat-alat yang mendukung kesuksesan secara sosial, mereka terbebas dari tanggung jawab untuk

berpikir bahwa kriminalitas mungkin merupakan produk dari sebuah sistem yang memberikan mereka banyak sekali keuntungan, dan solusi dari masalah tersebut mungkin melibatkan kemauan mereka untuk memberikan sebagian dari keistimewaan (perlakuan istimewa) yang mereka miliki. Cara berpikir yang lebih mengarah bahwa kriminalitas adalah sebuah konsekuensi dari individu yang menyimpang bukan sebagai akibat dari ketidakadilan dalam masyarakat adalah bagian dari ideologi borjuis, dan sejauh cara berpikir tersebut diterima oleh subordinat/kelompok yang didominasi (dan bahkan oleh kriminal itu sendiri, yang mungkin sangat percaya bahwa mereka layak untuk dihukum dan sistem pengadilan kriminal adalah adil bagi semua orang), hal ini adalah hegemoni yang sedang bekerja. Persetujuan mereka terhadap kebijakan umum adalah kemenangan sementara dari hegemonik.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa teori Marx mengenai ideologi sebagai kesadaran palsu yang terkait erat dengan dasar ekonomi dari masyarakat dan mengajukan bahwa kesalahan pada kondisi material dari kelas pekerja akan membuat tidak terhindarkan untuk menghasilkan perlawanan terhadap tatanan sosial yang memproduksinya.

Ideologi juga merupakan sekelompok nilai unggul dan luhur yang dilepaskan oleh pencetusnya, kemudian diakui dan dinyatakan sebagai sebuah ideologi dalam membimbing proses pemikiran dan tindakan manusia mengambil sebuah keputusan. Ideologi berfungsi sebagai motor penggerak dan ruh sebuah perjuangan. Sistem nilai ideal yang disebut ideologi, oleh sementara orang

dijadikan doktrin karena sifat-sifat sakral atau yang disakralkan, dipuja, dijadikan arah dan tujuan (Rewansyah,2010:21).

Setiap negara memiliki ideologi tersebut, yang dijaga, disakralkan, dipuja, diajarkan, diamalkan, dan menjadi pembimbing setiap pemikiran dan tindakan serta keputusan, yang selanjutnya disebut sebagai ideologi negara. Ideologi negara membangun karakter kepribadian bangsa yang mengobarkan semangat kebangsaan dan melahirkan jiwa patriotisme siap membela harga diri bangsa dan negaranya, siap mengorbankan jiwa dan raganya. Ideologi ini dikenal dengan istilah ideologi hukum seperti yang tertuang didalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam menegakan hukum Negara Indonesia. Realisasi dari penerapan ideologi hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti hakim yang memutuskan secara adil suatu perkara, polisi melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum secara benar, tepat, dan bijaksana, termasuk sebuah media massa(cetak) menyajikan wacana-wacana berita yang benar, transparan, dan berdasarkan fakta yang membentuk opini publik bahwa ideologi yang terangkum tepat dan benar dari pemberitaan tersebut, bukan sebaliknya berusaha membohongi publik dengan ideologi yang palsu atau opini palsu.

Idiologi dalam konteks media seperti yang diterjemahkan oleh para ahli, merupakan sistem makna yang membantu, menjelaskan dan mendefinisikan realitas dan membantu dalam membuat nilai-nilai membenaran atas realitas tersebut. Idiologi juga menjadi suatu jalur atau keyakinan yang berdampak pada pesan-pesan yang seragam dalam suatu media. Pesan-pesan dalam suatu media

akan mempresentasikan ideologi apa yang dianut oleh media tersebut. Salah satu bentuk ideologi penulis, yakni ideologi independensi. Ideologi-ideologi yang ada pada dikursif (wacana) suatu media massa dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan pembuat teks (wartawan) tersebut, dan kondisi material masyarakat, yaitu kondisi ekonomi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Teun A. van Dijk dalam studi mengenai analisis wacana. Dijk menyatakan bahwa "... ideologi adalah sebuah sistem yang merupakan basis pengetahuan sosio-politik suatu kelompok. Sebab itu, ideologi mampu mengorganisir perilaku kelompok yang terdiri atas opini menyeluruh yang tersusun secara skematis seputar isu-isu sosial yang relevan seperti aborsi, kriminal, ekonomi, energi nuklir ataupun affirmative action. Hal inilah yang melatarbelakangi keberagaman pemaknaan suatu ideologi dalam konteks sosial.

Idiologi secara umum memiliki dua pengertian yang berbeda. Pengertian dalam tataran positif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas pandangan dunia (*world-view, weltanschauung*) yang menyatakan sistem nilai kelompok atau komunitas sosial tertentu untuk melegitimasikan kepentingannya. Sementara itu, pengertian dalam tataran negatif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas kesadaran palsu. Dalam arti, bahwa ideologi merupakan sarana manipulatif pemahaman manusia mengenai realitas sosial (Mannheim, 1991).

Ideologi mempunyai tiga ragam. Pertama, ideologi dalam arti penuh. Ragam ideologi dalam arti penuh bermakna bahwa ideologi merupakan ajaran seperti agama Islam, pandangan dunia (ideologi kiri seperti anarkisme,

komunisme, sosialisme, serta ideologi kanan seperti liberalisme, konservatisme, dan fasisme), filsafat, sejarah yang memerlukan tujuan-tujuan dan norma sosial politik - yang diklaim sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan lagi serta sekaligus sudah mapan dan harus dituruti secara penuh-paripurna, harus dijalankan dan ditaati oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ideologi arti penuh berarti ideologi yang mempunyai status moral absolut dan menuntut ketaatan mutlak. Ragam ideologi tertutup ini diambil dari konsiderasi elit yang harus dipacu, dipropagandakan dan dipublikasikan (Franz Magnis, 2000: 232-235).

Ragam kedua adalah ragam ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka lebih merupakan cita-cita etika politik yang terbuka pada tindakan konkretnya. Justru cita-cita atau nilai tersebut menjamin kebebasan masyarakat untuk melaksanakan cita-cita tersebut. Dalam ideologi terbuka, cita-cita dilaksanakan tanpa ada paksaan.

Ragam ketiga, ideologi implisit. Ideologi implisit adalah keyakinan atau sistem nilai hakekat realitas dan cara bertindak masyarakat yang tidak dirumuskan secara eksplisit. Meskipun implisit, ideologi tersebut diyakini dan diresapi dalam seluruh gaya hidup, merasa, berpikir bahkan bermasyarakat. Ideologi biasanya sulit untuk dibahasakan, namun tercermin dalam perbuatan seseorang atau kelompok begitupun dalam suatu media massa.

Dalam ilmu sosial, ideologi mengalami banyak pemaknaan. Ringkasnya, ideologi dapat dilihat dalam tiga acuan pokok. Pertama, ideologi sebagai realitas yang bermakna netral. Artinya, ideologi dimaknai sebagai keseluruhan sistem

berpikir, nilai dan sikap dasar rohani suatu kelompok sosial dan komunitas kebudayaan tertentu.

Kedua, ideologi sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Pengertian ideologi sebagai kesadaran palsu menyatakan bahwa ideologi merupakan sistem berpikir yang sudah terdistorsi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam pengertian ini, makna ideologi justru bernilai negatif. Artinya, ideologi merupakan suatu pandangan yang tidak wajar atau sebuah teori yang tidak berorientasi pada nilai kebenaran, melainkan sudah mengambil sikap berpihak pada kepentingan tertentu.

Ketiga, ideologi sebagai sistem keyakinan yang tidak rasional. Artinya, bahwa ideologi merupakan hanya sekedar rangkaian sistem kepercayaan dan keyakinan subjektif (*belief system*). Konsekuensinya adalah ideologi tidak membuka kemungkinan pertanggungjawaban rasional dan objektif (Magnis, 1992:230-231).

Dari beberapa ragam ideologi tersebut, dapat dikatakan bahwa di dalam masyarakat muncul berbagai pemaknaan terhadap sebuah ideologi yang dilatarbelakangi oleh pola pikir, dan keyakinan masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi material masyarakat itu sendiri (kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kebudayaan), dan kepentingan-kepentingan, serta kekuasaan untuk melegitimasi kepentingan tersebut. Kekuasaan ini, dapat berupa kekuasaan sosial yang didasarkan pada hak akses terhadap sumber-sumber yang bernilai sosial, seperti kekayaan, penghasilan, posisi/jabatan, dan status sosial, termasuk akses terhadap berbagai wacana, yang merupakan sumber kekuasaan yang penting.

Kekuasaan juga berdimensi kognitif artinya selain mengontrol aksi, juga membatasi kebebasan bertindak dari kelompok yang terdominasi, tetapi juga mempengaruhi jalan pikirannya.

Hal yang terpenting bahwa kekuasaan yang lebih modern dan cenderung efektif, kebanyakan bersifat kognitif, yang dicapai di antaranya melalui persuasi dan manipulasi. Termasuk memanipulasi kebenaran yang ada didalam sebuah wacana. Untuk itu diperlukan “akal sehat” untuk memahami kebenaran sebuah wacana. Seperti yang diungkapkan oleh Raymond William (1997, Fiske, 2012: 269) tentang batasan utama ideologi pada point dua, yaitu tentang “kesadaran palsu”. Mark (Fiske, 2012: 280-281) mengungkapkan tentang konsep ideologi yang relatif sederhana, yaitu ideologi merupakan alat bagi kelas penguasa untuk membuat ide-ide(pemikiran) mereka diterima di dalam masyarakat sebagai sesuatu yang alami dan normal.

Ideologi Mark ini terkait pada bidang ekonomi. Menurut Mark ideologi dari kaum borjuis membuat para pekerja, atau kaum tertindas (termarginal) berada pada kondisi kesadaran palsu (*false consciousness*). Kesadaran manusia mengenai siapa mereka, bagaimana mereka berhubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dan juga termasuk makna yang mereka ciptakan terkait dengan pengalaman sosial mereka diproduksi oleh masyarakat, bukan oleh alam ataupun biologi. Kesadaran kita ditentukan oleh masyarakat di mana dilahirkan, tidak oleh kondisi alamiah kita atau psikologi individual.

Di majalah *Tempo* edisi 16-22 Juli terdapat berita tentang “Jejak Hitam Gubernur Hijau” yang intinya tentang pelanggaran-pelanggaran yang berujung

pada kerusakan hutan, yang disebabkan oleh keputusan yang diambil oleh salah satu pejabat teras di Aceh. Di dalam berita tersebut penulis secara “gamblang” menjelaskan tentang pelanggaran yang berujung pada kerusakan di Rawa Tripa, Aceh. Bahkan dalam peristiwa pelanggaran tersebut turut campur penegak hukum atau pihak yang melanggar dilindungi oleh aparat penegak hukum yang seyogyanya sebagai penegak keadilan dan kebenaran. Seperti kutipan berikut.

- (2) “Para aktivis lingkungan juga menuding polisi dan Tentara Nasional Indonesia berada di belakang Kallista. menurut Halim Gurning, Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari di Nagan Raya, kantor dan lahan Kallista selama ini dijaga polisi dan tentara. Mereka melarang warga dan para aktivis memasuki lahan PT Kallista. “Komandan mereka mengancam kami dan anak buahnya mengintai kantor kami,” kata Halim.

Dalam kutipan tersebut tergambar bagaimana sosok polisi dan tentara dalam memposisikan diri sebagai agen dari hukum yang didesain untuk melindungi kepentingan mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dengan kata lain menjaga mereka yang berkuasa dari perlawanan kekuatan perubahan sosial. Hal itu akan lebih memperkuat mitos bahwa polisi atau tentara adalah “sosok yang kejam, dan tidak bisa dihukum” seperti halnya pejabat. Jadi tindakan yang mereka(polisi, tentara, pejabat) lakukan adalah wajar dan “alami”. Kesadaran itu yang coba dibangun oleh penulis terhadap pembacanya dalam menginterpretasi peristiwa yang ada bahwa mereka (Polisi, Tentara, Pejabat) adalah sosok individu manusia yang dapat melanggar hukum terlepas dari jabatan/statusnya sebagai apa dan dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Hal inilah yang disebut sebagai kesadaran palsu karena menyangkal makna yang ‘benar’ oleh sifat dasar polisi, tentara, dan pejabat’. Selain itu ada hal

yang esensial dari berita tersebut jika diinterpretasikan secara benar bahwa penulis bukan hanya memaparkan tentang kerusakan yang dialami hutan gambut Rawa Tripa, tetapi lebih mengandung makna secara implisit bahwa kinerja pemerintah yang lamban dalam menangani kerusakan hutan gambut Rawa Tripa, Aceh. Atau lebih tepatnya diusut menjelang binasa.

Selain batasan tentang ideologi di atas, Antonio Gramsci, memperkenalkan ideologi *hegemony*. Secara singkat, *hegemony* melibatkan dan menenangkan kembali persetujuan dari mayoritas terhadap sistem yang menundukkan mereka. Dua elemen dari Gramsci yang lebih ditekankan oleh Mark atau Althusser adalah resistensi dan ketidakstabilan. Salah satu strategi kunci dari hegemoni adalah konstruksi ‘akal sehat’.

Jika pemikiran-pemikiran dari kelas penguasa dapat diterima sebagai hal yang masuk akal (tidak ada tendensi kelas), kemudian objek ideologis dari mereka tercapai dan kerja ideologis mereka tertutupi. Contoh dari ‘akal sehat’ adalah di dalam masyarakat kita kriminal adalah individu-individu yang aneh dan menyimpang yang perlu hukuman atau koreksi. Cara berpikir seperti itu menutupi kenyataan bahwa para pelanggar hukum seperti itu menutupi kenyataan bahwa para pelanggar hukum adalah orang-orang yang ke luar dari proporsi masyarakat karena berasal dari kelompok sosial yang lemah atau terpinggirkan-mereka berasal dari ras, kelas, atau umur yang ‘salah (tindak dominan)’.

Jadi, cara berpikir yang masuk akal membuat mereka dan tidak membuat mereka bisa berpartisipasi pada logika masuk akal sehingga penyebab kriminalitas lebih bersifat sosial dibandingkan karena faktor individual. Sedangkan warga

Negara yang 'patuh hukum', yang secara 'umum' dan 'kebetulan' berasal dari kelas-kelas yang memiliki banyak kesempatan untuk mengakses alat-alat yang mendukung kesuksesan secara sosial, mereka terbebas dari tanggung jawab untuk berpikir bahwa kriminalitas mungkin merupakan produk dari sebuah sistem yang memberikan mereka banyak sekali keuntungan, dan solusi dari masalah tersebut mungkin melibatkan kemauan mereka untuk memberikan ssebagian dari keistimewaan (perlakuan istimewa) yang mereka miliki.

Cara berpikir yang lebih mengarah bahwa kriminalitas adalah sebuah konsekuensi dari individu yang menyimpang bukan sebagai akibat dari ketidakadilan dalam masyarakat adalah bagian dari ideologi borjuis, dan sejauh cara berpikir tersebut diterima oleh subordinat/kelompok yang didominasi (dan bahkan oleh kriminal itu sendiri, yang mungkin sangat percaya bahwa mereka layak untuk dihukum dan sistem pengadilan kriminal adalah adil bagi semua orang), hal ini adalah hegemoni yang sedang bekerja. Persetujuan mereka terhadap kebijakan umum adalah kemenangan sementara dari hegemonik.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa teori Marx mengenai ideologi sebagai kesadaran palsu yang terkait erat dengan dasar ekonomi dari masyarakat dan mengajukan bahwa kesalahan pada kondisi material dari kelas pekerja akan membuat tidak terhindarkan untuk menghasilkan perlawanan terhadap tatanan sosial yang memproduksinya.

B. Kekuasaan Dalam Wacana

Kekuasaan tidak selalu identik dengan jabatan atau kedudukan seseorang. Karena kekuasaan pada dasarnya bisa dimiliki dan dipraktikkan oleh semua orang. Thomas (dalam Azwandi, 2010: 5) menyatakan bahwa kekuasaan ada dalam semua hubungan sampai tingkat tertentu yang direalisasikan melalui tindakan verbal maupun nonverbal. Representasi dari kekuasaan dapat dilihat dari segi hubungan-hubungan, yaitu (1) kekuasaan dalam hubungan yang setara, dan (2) kekuasaan dalam hubungan yang tidak setara.

Kekuasaan dalam hubungan yang tidak setara disebabkan oleh adanya faktor-faktor sosial atau konteks sosial seperti jabatan, posisi, atau memiliki otoritas formal dan resmi. Misalnya, kekuasaan yang ditunjukkan polisi kepada tersangka, atasan kepada bawahan, guru kepada murid, dan lain-lain yang sifatnya vertikal atau satu arah. Ini artinya kekuasaan yang dimaksudkan bisa untuk memaksakan atau melegimitasikan perintah secara sepihak walaupun dalam realisasinya menimbulkan perlawanan. Kekuasaan yang seperti ini sifatnya permanen. Apabila orang tersebut tidak memiliki jabatan atau kedudukan lagi, maka kekuasaan yang dimilikinya pun ikut hilang atau terampas.

Kekuasaan yang *kedua* adalah kekuasaan yang dilihat dari hubungan yang setara. Misalnya, kekuasaan yang ditampakkan antara teman sekelas, pebisnis dengan koleganya, dan lain-lain yang bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicaranya dalam berinteraksi. Penerapan kekuasaan dalam hubungan yang setara tidak bersifat konstan diterapkan oleh satu orang peserta, melainkan bisa berubah sesuai dengan dinamika interaksi. Artinya seorang peserta bisa mengambil alih

kekuasaan dengan cara menukar topik pembicaraan dengan topik yang lain tergantung pada keterampilan orang dalam berinteraksi.

Kekuasaan juga dapat terkandung dalam media massa, melalui pemberitaannya. Karena bahasa yang diungkapkan oleh redaksi media massa tersebut mengandung tujuan-tujuan tertentu atau adanya ideologi yang bersemayam dalam wacana pemberitaannya. Untuk melihat dan membedah ideologi apa yang terkandung dalam media tersebut, dapat digunakan analisis wacana kritis sebagai metodenya.

AWK mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya di sini, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat, seperti kekuasaan laki-laki. Wacana seksisme, kekuasaan kulit putih terhadap kulit hitam, dan wacana mengenai rasisme, kekuasaan perusahaan berbentuk dominasi pengusaha kelas atas bawahan, dan sebagainya. Pemakaian bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pengarang, atau pembaca, ia juga bagian dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu, misalnya antara dokter dan pasien, antara buruh dan majikan, antara laki-laki dan perempuan, atau antara kulit putih dan kulit hitam. Hal ini mengimplikasikan AWK tidak membatasi diri dari detil teks atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Percakapan antara buruh dan majikan bukan percakapan yang

alamiah, karena adanya dominasi kekuasaan majikan terhadap buruh tersebut. Aspek kekuasaan perlu dikritisi untuk melihat, misalnya jangan-jangan apa yang dikatakan oleh buruh hanya untuk menyenangkan atasannya saja. Kekuatan dalam hubungannya dengan wacana penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol seseorang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Kontrol ini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga kontrol secara mental atau psikis kelompok yang dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak seperti apa yang diinginkan olehnya. Kenapa hanya bisa dilakukan oleh kelompok dominan? Karena kelompok dominan mempunyai akses dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan. Kelompok dominan lebih mempunyai akses, seperti pengetahuan, uang, dan pendidikan dibandingkan kelompok yang tidak dominan.

Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-macam. Bisa berupa kontrol atau konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya mendengar dan mengiyakan. Seorang sekretaris dalam rapat, karena tidak mempunyai kekuasaan tugasnya hanya mendengarkan dan menulis, tidak punya wewenang untuk berbicara. Selain konteks, kontrol tersebut juga diwujudkan dalam bentuk mengontak struktur wacana. Seseorang yang mempunyai kekuasaan, bukan hanya menentukan bagaimana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak, tetapi bagaimana pula ia harus ditampilkan. Hal ini bisa dilihat dari penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan ada dimana-mana dan bisa terjadi dalam berbagai kondisi. Hal ini sesuai dengan pendapat Foucault (dalam Azwandi, 2010: 14), bahwa kekuasaan beroperasi berbagai konteks kehidupan sehari-hari (tingkat mikro) dan konteks-konteks lebih luas (tingkat makro). Keberadaan kekuasaan di berbagai konteks menunjukkan dinamika kehidupan yang selalu aktif untuk menunjukkan jati dirinya di tengah masyarakat.

C. Analisis Wacana Kritis (AWK)

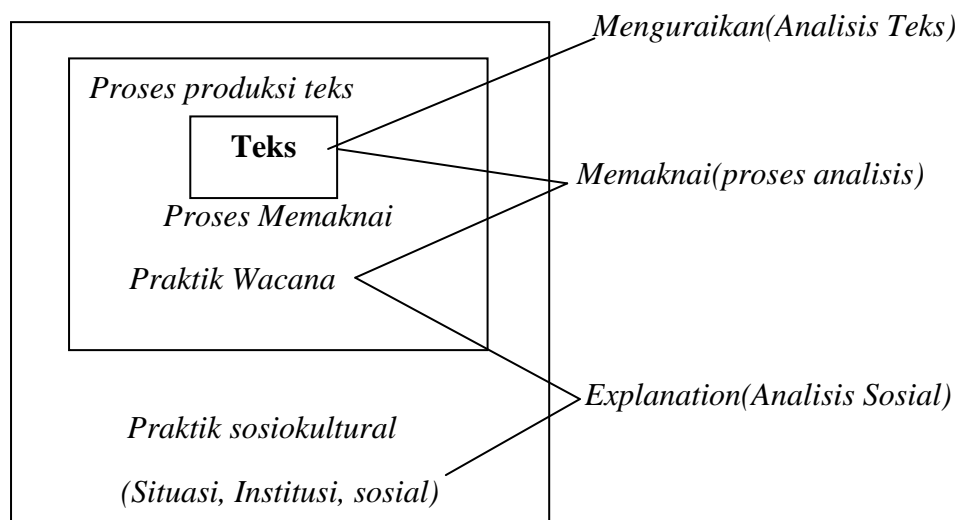
Dalam teori analisis wacana kritis, analisis wacana tidak hanya dipandang sebagai sebuah studi bahasa, tetapi juga merupakan sebuah upaya untuk mengungkapkan maksud tersembunyi dari subjek yang mengemukakan maksud pernyataan. Analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam sebuah teks untuk dianalisis, tetapi analisis bahasa dalam hal ini bukan hanya melihat bahasa dari segi aspek kebahasaan, melainkan mengaitkan bahasa dengan konteks.

Konteks disini adalah semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan memengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam teks, situasi dimana teks tersebut diproduksi, dan fungsi yang dimaksud. Konteks dapat berupa aspek-aspek historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang relevan dan berpengaruh pada proses produksi serta penafsiran teks.

Tujuan dari analisis wacana kritis sendiri adalah untuk mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung dibalik kata-kata dalam teks atau ucapan dalam berbagai bentuk kekuasaan. Analisis wacana kritis bermaksud untuk menjelajahi secara sistematis tentang keterkaitan antara praktik-

praktik diskursif, teks, peristiwa, dan struktur sosiokultural yang lebih luas. Jadi, analisis wacana kritis dibentuk oleh struktur sosial (kelas, status, identitas etnik, zaman dan jenis kelamin), budaya, dan wacana (bahasa yang digunakan). Analisis wacana kritis mencoba mempersatukan dan menentukan hubungan antara (1) teks aktual, (2) latihan diskursif dan (3) konteks sosial yang berhubungan dengan teks dan latihan diskursif.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Fairclough yang berusaha membangun model analisis wacana yang memiliki kontribusi terhadap analisis sosial dan budaya mengkombinasikan atau menghubungkan tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Dalam analisis wacananya, Fairclough memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa sebagai sebuah praktik sosial. Dalam model analisis Fairclough ini ada tiga dimensi wacana, yaitu teks (*text*), praktik wacana (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*). Model analisis Fairclough ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar. Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (Fairclough, 1995:98)

Ideologi yang terkandung didalam sebuah teks dapat berupa pernyataan sikap, pandangan, penilaian, maupun keyakinan sosial. Penyingkapan ideologi di balik teks itulah yang menjadi tugas utama dalam analisis wacana kritis (Yuwono, 2008:2). Ideologi erat kaitannya dengan kekuasaan sosial (*social power*). Ideologi dalam hal ini berupa kontrol suatu kelompok atau organisasi untuk mengatasi tindakan atau pikiran anggota kelompok lain, sehingga membatasi kebebasan bertindak pihak lain atau memengaruhi pengetahuan, perilaku dan ideologinya (Subagyo dalam Puspitorini, dkk. (ed.), 2008: 400-401). Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan dan menyebarkan ideologi tersebut kepada khalayak (masyarakat) adalah melalui media massa(cetak).

Media Massa (*Mass Media*) adalah media/medium, saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (*channel of mass communication*). Komunikasi massa sendiri merupakan kependekan dari komunikasi melalui media massa (*communicate with media*). Di dalam media massa cetak (surat kabar, majalah, dan lain-lain) memuat wacana-wacana berita tentang berbagai peristiwa.

Wacana-wacana berita bukan hanya disajikan sebagai berita, tetapi dapat dijadikan sarana pertarungan kekuasaan dari berbagai pihak yang ingin membatasi pembentukan opini publik atas suatu masalah hanya pada satu ideologi tertentu. Termasuk redaksi atau pengelola surat kabar (termasuk penulis teks) tentunya memiliki ideologi masing-masing, dan sebagai wujud praktik wacana (*discourse practice*) dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*). Melalui wacana berita tersebut pihak redaksi mengungkapkan ideologinya.

Wacana adalah proses pengembangan dari komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi, seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain, eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, misalnya konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi keberadaannya, dan lain-lain. Kesemuanya itu dapat berupa nilai-nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain.

Jadi, analisis wacana yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi atau dengan kata lain adalah ideologi dari subjek dalam hal ini adalah penulis berita tentang hukum/kriminal pada media massa cetak, yaitu majalah Tempo. Jadi, wacana dapat dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan yang dominan terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi dalam merealisasikan ide-ide dan gagasan yang dianutnya. Untuk menganalisis bentuk ideologi independensi wartawan pada pemberitaan kasus hukum dalam majalah Tempo edisi Juli 2012, yang dianalisis dengan metode analisis wacana kritis (AWK).

Analisis Wacana Kritis (AWK) memiliki lima karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Van Dijk, Fairclough, Wodak, dan Eriyanto(2005:8), yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.

Wacana dipahami sebagai suatu tindakan (*action*). Karena ketika seseorang berusaha berinteraksi dengan orang lain baik secara langsung (lisan) maupun secara tidak langsung (tulisan) dengan menggunakan bahasa sebagai

medianya. Artinya dalam sebuah wacana ada unsur-unsur seperti membujuk, mengganggu, melarang, memperingatkan, dan sebagainya.

Karakteristik *kedua*, yaitu konteks. Konteks dari wacana berupa latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana; *pertama*, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana gender, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal gugat menggambarkan wacana. *Kedua*, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara, dan pandangan atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana.

Ketiga, yaitu historis. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Artinya untuk memahami sebuah wacana, kita harus mengetahui terlebih dahulu atau memiliki pengetahuan tentang isi dari wacana tersebut. Sehingga bisa mengerti mengapa bahasa yang digunakan dalam tersebut seperti itu.

Keempat, yaitu kekuasaan. Kekuasaan di sini dipahami sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melegitimasi keinginan atau kepentingannya melalui wacana tersebut. Sedangkan karakteristik yang *kelima*, yaitu ideologi. Ideologi merupakan suatu kumpulan ide atau gagasan yang dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.

D. Berita Hukum/Kriminal

Berita dalam istilah Inggris adalah “News” atau baru, dengan konotasi pada hal-hal baru. Secara etimologis istilah “berita” dalam bahasa Indonesia mendekati istilah “*bericht (en)*” dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda istilah “*bericht (en)*” dijelaskan sebagai “*mededeling*” (pengumuman) yang berakar kata dari “*made (delen)*” dengan sinonim pada “*bekend maken*” (memberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal) dan “*vertelen*” (menceritakan atau memberitahukan) (van Haeringen, 1977:87 dan 559; Wojowasito, 1981: 70, 394, dan 740). Sedangkan Departemen Pendidikan RI (1989: 108 dan 331) membakukan istilah “berita” dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Juga “berita” disamakan maknanya dengan “khabar” dan “informasi (resmi)”, yang berarti penerangan, keterangan, atau pemberitahuan. Salah satu jenis berita yang ada didalam majalah Tempo adalah berita tentang hukum yang memuat tentang korupsi dan hukum kriminal atau kejahatan lainnya.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang analisis wacana sudah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya membahas tentang analisis retorika wacana, dan analisis wacana kelas. Sedangkan penelitian yang berfokus pada analisis wacana kritis baru satu orang, untuk itu peneliti berminat untuk mengkaji lebih lanjut tentang analisis wacana kritis wacana-wacana yang ada dimedia massa khususnya surat kabar dan majalah.

Nurasiah (2009) melakukan penelitian tentang analisis retorika pidato dan analisis retorika syair, dengan judul tesis ‘Analisis Struktur Retorika Pidato Penceramah Agama Terkemuka di kota Bengkulu serta Implementasinya Dalam Pembelajaran Berbicara Siswa SMA’. Dalam penelitiannya Nurashiah menganalisa teks yang berjenis argumentatif dari transkripsi ceramah agama terkemuka di kota Bengkulu dengan menggunakan analisa model Labov dan Metorical struktur theory yang dikembangkan oleh Mann dan Thompson. Dari penelitian itu Nurashiah berhasil mengidentifikasi bahwa hampir semua teks tidak memiliki Abstrak(A), dan pada umumnya memiliki bagian Orientasi(O), Perumitan Peristiwa(P), Resolusi(R), dan Koda (K). Selain itu didapati bahwa penceramah menggunakan berbagai gaya/bentuk pengungkapan unsur-unsur A-O-P-K. Pada teks yang bergenre argumentatif, pola retorika yang menonjol digambarkan melalui panjang teks dan diagram RST adalah penekanannya ada pada resolusi. Hal ini ditandai oleh bagian resolusi yang lebih panjang dari bagian unsur O-P-K. Untuk penekanan bagian resolusi ditujukan sebagai kekuatan daya persuasif teks, dan menyatakan dengan tegas bagian resolusi sebagai tujuan/inti (nukleus) teks.

Nurlaili (2011) dengan judul tesis ‘Analisis Retorika Syair Dalam Acara Ritual Mencukur Anak di Kota Bengkulu’. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurashiah, yaitu untuk mengetahui pola retorika dari struktur generik teks syair mencukur anak di kota Bengkulu. Dengan menggunakan analisa model *struktur generik teks* oleh Mann dan *rhetorical structure theory* (RST). Dari analisa tersebut ditemukan bahwa pola retorika pada teks syair mencukur anak di kota Bengkulu memiliki

pola, yaitu bagian pembuka atau abstrak(A) dan orientasi(O), bagian isi atau perumitan peristiwa(P), dan bagian penutup atau resolusi(R) dan koda(K).

Defi Umami (2011) melakukan penelitian tentang struktur retorika wacana dengan judul tesis ‘Kajian Struktur Retorika Wacana Siswa SMP Negeri 9 Lubuklinggau’. Dari penelitiannya itu, Defi Umami berhasil mendeskripsikan struktur retorika dari wacana bergenre argumentasi yang bersumber dari siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Lubuklinggau dan mendeteksi faktor-faktor yang menghambat dalam menulis karangan argumentasi. Dalam proses menganalisa datanya Defi Umami menggunakan metode analisis teks model “Top-Down” dan “Botton-Up” Tirkkonen-Condet dan *rhetorical structure theory* yang dikembangkan oleh Mann dan Thompson. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa kecendrungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Lubuklinggau dalam menulis karangan belum tepat. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kekeliruan mulai dari struktur atau pola kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimat, penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah baik secara struktur maupun istilah, dan diksi atau pilihan kata yang tidak tepat.

Yusmaniar (2009) melakukan penelitian tentang analisis wacana tulis dengan judul tesis ‘Analisis Wacana Tulis Siswa SMA Negeri di Kota Lubuklinggau (Suatu Kajian Analisis Kohesi dan Koherensi)’. Dalam penelitiannya, Yusmaniar berhasil mendeskripsikan penggunaan sarana kohesi gramatikal dan sarana kohesi leksikal serta jenis koherensi dalam tulisan siswa kelas XI SMA Negeri 4 di Kota Lubuklinggau. Sarana kohesi gramatikal terdiri dari pronominal, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Dari hasil penelitian Yusmaniar

itu menunjukkan bahwa sarana kohesi gramatikal, sarana kohesi leksikal dan jenis koherensi sangat diperlukan dalam membentuk sebuah wacana.

Eva Susanti (2011) melakukan penelitian tentang analisis wacana kelas dengan judul tesis ‘Analisis Wacana Kelas Bahasa Guru Dalam Pembelajaran di TK Perwanida Argamakmur Bengkulu Utara’. Dalam tesisnya, Eva memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui penggunaan bahasa guru taman kanak-kanak dengan menggunakan metode dekskriptif. Sedangkan data yang dianalisis berupa data ujaran guru dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan struktur wacana Sinclair dan Couldthard. Dari hasil penelitiannya itu, Eva Susanti berhasil menemukan bahwa berdasarkan struktur wacananya bahasa yang digunakan oleh guru dalam wacana kelas ini sudah termasuk baik hali ini dapat dilihat dari reaksi anak dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Untuk penggunaan kalimat yang sering digunakan oleh guru berupa kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat introgatif, kalimat eksklamatif dan kalimat pujian.

Edi Gunawan (2009) melakukan penelitian tentang analisis wacana dengan objek kajian berupa wacana iklan di televisi yang diteliti, dengan judul tesis ‘Analisis Wacana Iklan di Televisi dan Kontribusinya Terhadap Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMP’. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Edi adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) dengan metode deskriptif kualitatif. Objek kajiannya difokuskan pada iklan yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional, yaitu RCTI dan Metro TV baik teks secara lisan maupun tulisan. Dari hasil penelitiannya, Edi berhasil menemukan fakta bahwa penggunaan bahasa iklan ditelevisi baik penggunaan kata, kalimat, dan pengorganisasian teks dimanfaatkan

untuk member citra positif terhadap produk tertentu sebagai usaha pemasaran. Penggunaan bahasa yang persuasif ini dapat dijadikan bahan ajar bahasa Indonesia di MP.

Pada dasarnya, analisis penelitian ini masih berada dalam tataran yang sama dengan penelitian-penelitian analisis wacana tersebut. Namun, lebih difokuskan pada analisis wacana secara kritis untuk mengetahui ideologi pembuat teks yang tercermin dari wacana tersebut. Misalnya, untuk mengetahui bentuk ideologi hukum dari penulis teks (wartawan), dan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur kekuasaan dalam wacana berita hukum pada majalah *Tempo* edisi Juli 2012.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma wacana kritis untuk melakukan penafsiran terhadap teks terutama teks berita dalam media massa. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis teks berita menggunakan metode analisis wacana kritis. Karena bahasa dalam media massa merupakan rekonstruksi dari penulis tek (wartawan). Untuk itu melalui analisis wacana kritis peneliti mencoba menelisik dan membedah lebih lanjut bagaimana bentuk idiologi hukum pada pemberitaan kasus hukum dalam majalah *Tempo* edisi Juli 2012.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian ini berupa kosakta, frase, atau kalimat , serta gambar yang menunjukkan kondisi latar dari kasus berita yang dimunculkan dalam teks wacana berita hukum majalah *Tempo* Edisi Juli 2012.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah dokumen yang berupa teks wacana berita kasus hukum pada majalah *Tempo* edisi Juli 2012. Majalah *Tempo* merupakan salah satu media massa nasional yang terbit secara berkala atau mingguan. Selama bulan Juli majalah *Tempo* terbit dalam empat edisi yang terdiri dari empat berita, yaitu berita 1 (edisi 25-1 Juli 2012) berjudul “*Bukan Sekedar*

Restitusi”, berita 2 (edisi 2-8 Juli 2012) berjudul “*Transfer Haram Uang Titipan*”, berita 3 (edisi 9-15 Juli 2012) berjudul “*Kode Samaran Mafia Anggaran*”, dan berita 4 (edisi 16-22 Juli 2012) berjudul “*Jejak Hitam Gubernur Hijau*”.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Seperti yang diungkapkan oleh Moeloeng (206-121) bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif selain sebagai perencana sekaligus sebagai pelaksana pengumpul data atau sebagai instrument. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yakni dokumen yang dikumpulkan berupa berita pelanggaran hukum yang terjadi pada bulan Juli 2012 di Majalah *Tempo*.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis data secara induktif, yaitu dengan tujuan agar data yang dikumpulkan bukan menolak hipotesis yang diajukan sebelum penelitian dilakukan.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan dengan menggunakan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono: 337), yaitu:

1. Peneliti terlebih dahulu membaca dan mencermati teks berita hukum pada majalah *Tempo* edisi Juli 2012.

2. Mengidentifikasi jenis ideologi yang dianut majalah *Tempo* pada Pemberitaan kasus hukum berdasarkan analisis wacana kritis.
3. Kemudian dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasian data berupa kosakata, frase, atau kalimat yang mengandung ideologi hukum.
4. Melakukan pembahasan
5. Menarik kesimpulan.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam menganalisis, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah menggunakan teknik *Triangulasi* (Moleong, 1988: 324-344).

Teknik triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi meliputi triangulasi sumber, penyidik, teori, dan metode. Moleong (2000: 179-187) mengungkapkan bahwa pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara uraian rinci, kecukupan referensi, dan auditing.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data, yaitu dengan membandingkan pendapat dan pandangan dari peneliti yang memiliki bahasan yang sama dan memiliki pengetahuan tentang analisis wacana kritis. Tujuannya untuk mengetahui pendapat dan pandangan yang berbeda dari peneliti.

Peneliti mengambil sumber sebanyak dua orang yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang analisis wacana kritis maupun yang memiliki

kajian penelitian yang sama. Peneliti berasumsi bahwa jika minimal dua orang sumber memiliki kesamaan pendapat dengan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang ada memiliki tingkat keabsahan yang baik.